

## PERFORMANSI HUTAN RAKYAT DI KELURAHAN SELOPURO KECAMATAN BATUWARNO KABUPATEN WONOGIRI

*(Private Forest Performance in the Village of Selopuro Subdistrict Batuwarno  
Wonogiri Regency)*

Nengsih Anen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa

Jalan KH. Sholeh Iskandar Km. 4, Cibadak, Tanah Sereal, Cibadak, Kota Bogor, 16166, Indonesia;

e-mail: nengsilviana@yahoo.com

### ABSTRACT

*Management of private forest is influenced by cultural habits and local knowledge. It can be influencing the management of forest, especially for its performance. So that, the utilities of forest resources is expected to provide its productivity, sustainability, and efficiency. This aim of this study was to measure the level of performance in private forest management in Selopuro Village, Batuwarno Subdistrict, Wonogiri Regency, Central Java Province. This study used a survey method. The data were conducted by interviewed using a structured questionnaire to respondents. The data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that the level of performance of private forest in Selopuro Village was high. The private forest performance is shown by high levels of private forest productivity, sustainability of private forest management, benefits of rules in the management and efficiency of private forest cost management. Therefore a high private forest performance will encourage forest management to be better.*

Keywords: *Performance, Private Forest, Private Forest Management*

### ABSTRAK

Pengelolaan hutan rakyat disetiap tempat dipengaruhi oleh kebiasaan budaya dan pengetahuan lokal. Hal ini tentunya berpengaruh pada pengelolaan hutan terutama dalam menjaga performansinya, sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan diharapkan mampu memberikan manfaat secara produktif, lestari, adil dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat performansi dalam pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode survai, dimana pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara menggunakan kuesioner terstruktur kepada responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat performansi hutan rakyat di Kelurahan Selopuro tergolong tinggi. Performansi hutan rakyat yang baik ditunjukkan dengan tingkat produktivitas hutan rakyat yang tinggi, berlangsungnya pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan, manfaat aturan dalam pengelolaan yang adil dan biaya pengelolaan hutan rakyat yang efisien. Dengan demikian, performansi hutan rakyat yang tinggi akan mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik.

Kata kunci: *Performansi, Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Rakyat.*

## I. PENDAHULUAN

Kajian-kajian tentang hutan rakyat telah banyak dilakukan di berbagai wilayah di Jawa, luar Jawa, dan wilayah lainnya. Fokus kajiannya mencakup berbagai topik, antara lain tentang karakteristik hutan rakyat (Bismark *et. al* 2007; Jariyah dan Wahyuningrum 2008); konsep pengelolaan (Awang 2007a, 2007b), peran ekonomi hutan rakyat (Suharjito 2000; Darusman dan Harjanto 2006; Muslich dan Krisdianto 2006; Winarno dan Waluyo 2007), pengelolaan tanaman (Widiarti dan Prajadinata 2008), kelembagaan (Hakim 2010, Nugroho 2010, Prihadi *et.al* 2010), insentif (Diniyati dan Awang 2010), tata usaha kayu (Sahadat dan Sabarudi 2007) dan potensi karbon hutan rakyat (BKPH-XI & MFP-II 2009).

Kajian-kajian hutan rakyat tersebut belum banyak perhatian terhadap performansinya. Performansi hutan rakyat merupakan kondisi atau keadaan (performa) hutan yang dikelola oleh masyarakat pemilik hutan. Sistem pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat memiliki performansi. Menurut Conway (1987) performansi hutan rakyat diukur dari produktivitas, keberlanjutan, keadilan, dan efisiensi. Mengacu pada Conway (1987) produktivitas didefinisikan sebagai *out-put* produk bernilai per unit sumber daya. Keberlanjutan didefinisikan sebagai kemampuan suatu agroekosistem untuk menjaga produktivitas dari waktu ke waktu. Keadilan didefinisikan sebagai pemerataan distribusi produk dari agroekosistem diantara yang berhak menerima manfaat dan dengan terdefinisinya *property rights* dengan baik maka akan tercapai efisiensi.

Menurut Suharjito *et al.* (2000) performansi hutan rakyat antara lain dipengaruhi oleh: (1) sistem pengelolaan, yaitu sistem penguasaan dan pengambilan keputusan apakah secara individual atau komunal. Sistem penguasaan dan pengambilan keputusan pengelolaan mempengaruhi responsibilitas terhadap ekonomi pasar dan

model ekonomi sosialnya; (2) Orientasi usaha, apakah sub-sisten atau komersial. Tingkat sub-sisten dan komersialisasi merupakan ukuran responsibilitas terhadap ekonomi pasar; (3) Jenis dan keragaman produk yang dikonsumsi atau dipasarkan merupakan respon terhadap kebutuhan pasar yang sekaligus mempengaruhi performansi pengelolaannya.

Praktik-praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional di Indonesia, seperti dikenal istilah hutan rakyat; hutan desa; hutan kebun; wanatani; atau menggunakan istilah daerah seperti *mamar* di Nusa Tenggara Timur, *limbo* di Kalimantan Timur, *tembawang* di Kalimantan Barat, *repong* di Lampung, dan *tombak* di Tapanuli Utara sebagai bukti kongkrit keberhasilan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan dan lahan dengan berbasiskan pada masyarakat.

Perkembangan hutan rakyat di setiap tempat dipengaruhi oleh kebiasaan budaya dan pengetahuan lokal. Suharjito *et al.* (2000) menyebutkan keberadaan hutan rakyat tidak semata-mata akibat interaksi alami antara komponen botani, mikroorganisme, mineral tanah, air, udara, melainkan adanya peran manusia dan kebudayaannya. Kreasi budaya yang dikembangkan dalam interaksinya dengan hutan ini berbeda-beda antara kelompok masyarakat. Hasil budaya ini terwujud dalam pola tanam yang bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Hal ini tentunya berpengaruh pada pengelolaan hutan terutama dalam menjaga performansinya, sehingga pemanfaatan sumberdaya hutan diharapkan mampu memberikan manfaat secara produktif, lestari, adil dan efisien. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian performansi hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan performansi hutan rakyat. Performansi hutan rakyat akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kelurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan data dilakukan dalam kurun waktu 2012-2015. Masyarakat Kelurahan Selopuro eksis mengelola hutan rakyat dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk kategori Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML). Jarak dari Kelurahan Selopuro ke ibu kota provinsi sekitar 133 km dapat ditempuh dalam waktu 3 jam 30 menit dengan menggunakan roda 4 (empat).

Penelitian ini menggunakan konsep performansi hutan rakyat yang dikembangkan oleh Conway (1987). Mengacu Conway (1987) Performansi hutan rakyat yang dimaksud adalah produktivitas, keberlanjutan, keadilan dan efisiensi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian sosial lebih mengacu kepada keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala bersifat kausal (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan pada beberapa variabel (Irawan 2007; Singarimbun 2008).

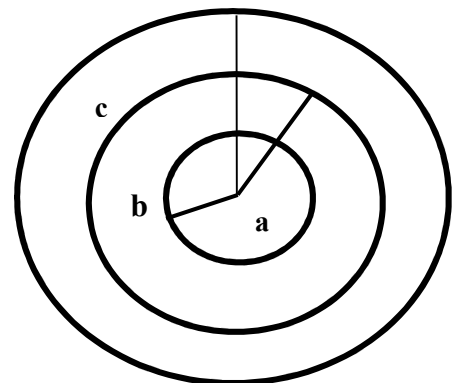
Metodologi penelitian yang digunakan metode survai. Metode survai adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner terstruktur kepada responden (Irawan 2007; Singarimbun 2008).

Penentuan responden ditentukan secara acak dari Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) yang memiliki/mengelola hutan rakyat di Kelurahan Selopuro sebanyak 30 responden. Jumlah responden ditentukan atas berbagai pertimbangan, yaitu: tingkat homogenitas populasi yang tinggi dan jumlah tersebut

dianggap cukup karena untuk data yang akan dianalisis dengan teknik statistika parametrik dapat menggunakan data minimal 30 (Usman dan Akbar 2008).

Pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara melalui kuesioner terstruktur kepada responden, pengamatan (*observation*) lapangan dan pengukuran lapangan. Pengukuran lapangan menggunakan metode inventarisasi tegakan yang bersumber pada Keputusan Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor 143/Kpts/DJ/I/1974 tentang RPKH, Perum Perhutani. Plot ukur yang digunakan adalah *circular plot* atau plot lingkaran (Gambar 1) dibagi dalam 3 ukuran berdasarkan perbedaan fase pertumbuhan, yaitu:

- Diameter lingkaran 7,94 m (luas 0,02 ha) untuk tegakan dominan umur muda/pancang (tinggi >1,5 m; diameter 2-10 cm);
- Diameter lingkaran 11,28 m (luas 0,04 ha) untuk tegakan dominan umur sedang/tiang (diameter >10-20 cm); dan
- Diameter lingkaran 17,8 m (luas 0,1 ha) untuk tegakan dominan umur tua/pohon (diameter > 20 cm).



Gambar 1. Metode Inventarisasi Tegakan pada Hutan Rakyat

Data yang terkumpul, diolah dan dianalisis dengan analisis performansi hutan rakyat, meliputi: produktivitas hutan rakyat, keberlanjutan hutan rakyat, keadilan usaha hutan rakyat dan efisiensi usaha hutan rakyat.

1. Produktivitas Hutan Rakyat

Produktivitas adalah kemampuan hutan menghasilkan keluaran (*output*) produk pada satuan luas kawasan hutan rakyat. Produktivitas hutan rakyat diukur dengan jumlah pohon per satuan luas hutan yang dimiliki oleh petani. Jumlah pohon yang dimiliki oleh petani hutan rakyat ditentukan dari hasil wawancara dengan responden. Jumlah kelas disesuaikan dengan kategori tingkatan yang diinginkan yaitu 3 kelas, besarnya tingkat jumlah pohon yang ada di lapangan yang dimiliki oleh petani hutan rakyat (rendah, sedang dan tinggi). Untuk mengukur tingkat jumlah pohon yang ada di lapangan yang dimiliki oleh petani hutan rakyat dilakukan dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Salung Nilai} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

Dalam pengelolaan hutan rakyat konvensional yang biasa digunakan sebagai standar hutan rakyat yang baik adalah 400 pohon/ha. Apabila lebih besar dari 400 pohon/ha terdapat di lapangan, maka hutan rakyat tersebut adalah baik dan sebaliknya kalau kurang dari 400 pohon/ha maka hutan rakyat tersebut kurang baik (Awang 2001). Penelitian ini menggunakan tiga kategori :

- Produktivitas rendah : jumlah pohon < 300 pohon/ha
- Produktivitas sedang : jumlah pohon 300 - 400 pohon/ha
- Produktivitas tinggi : jumlah pohon > 400 pohon/ha

Data ditabulasi dan dijelaskan secara deskriptif. Perhitungan potensi kerapatan pohon per hektar (Widayati & Riyanto 2005).

- Potensi kerapatan pohon per hektar :

$$NP_L = \sum_{i=1}^n Ni \qquad NH = \frac{NP_L}{LP_L}$$

Keterangan:

NP<sub>L</sub>= Jumlah individu pohon per plot ukur (pohon/plot)

N<sub>i</sub> = Pohon ke-*i*

NH = Kerapatan pohon per hektar (pohon/ha)

LP<sub>L</sub> = Luas plot ukur (0,1 ha)

- Rata-rata potensi kerapatan pohon per hektar

$$NH_r = \frac{\sum_{i=1}^n NH_i}{n}$$

Keterangan:

NH<sub>r</sub> = Rata-rata kerapatan pohon per hektar (pohon/ha)

NH<sub>i</sub> = Kerapatan pohon per hektar ke-*i* (pohon/ha)

n = Jumlah petani responden

- Total potensi kerapatan pohon per hektar

$$NH_t = NH_{rx} + NH_{ry} + NH_{rz}$$

Keterangan:

NH<sub>t</sub> = Total kerapatan pohon per hektar (pohon/ha)

NH<sub>rx</sub>= Rata-rata kerapatan pohon per hektar jenis pohon x (pohon/ha)

NH<sub>ry</sub>= Rata-rata kerapatan pohon per hektar jenis pohon y (pohon/ha)

NH<sub>rz</sub>= Rata-rata kerapatan pohon per hektar jenis pohon z (pohon/ha)

x = Jati

y = Mahoni

z= Jenis lain (jenis akasia, johar, lamtoro, trembesi, walikukun, kelapa)

2. Keberlanjutan Hutan Rakyat

Keberlanjutan adalah kemampuan hutan rakyat untuk menjaga produktivitasnya dari waktu ke waktu. Keberlanjutan diukur dari intensitas kegiatan yang dilakukan petani hutan rakyat untuk mempertahankan keberadaan tanaman, yaitu kegiatan penanaman/peremajaan tanaman (jumlah dan jenis tanaman yang di tanam sama dengan jumlah dan jenis tanaman yang ditebang). Tingkat intensitas kegiatan penanaman/pemeliharaan dikategorikan menjadi 3 kelas, (rendah, sedang dan tinggi).

Untuk mengukur tingkat keberlanjutan hutan rakyat menggunakan persamaan:

$$\text{Salung Nilai} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

Hasil pengukuran tingkat intensitas kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan hutan rakyat menggunakan tiga kategori, yaitu:

- Keberlanjutan rendah : tidak pernah dilakukan penanaman kembali

- Keberlanjutan sedang : jarang dilakukan penanaman kembali
- Keberlanjutan tinggi : sering dilakukan penanaman kembali

### 3. Keadilan Hutan Rakyat

Keadilan yaitu pemerataan manfaat (keuntungan) dari keberadaan usaha hutan rakyat bagi anggota kelompok yang bekerjasama dan berhak menerima manfaat sesuai aturan yang ada. Keadilan diukur berdasarkan kesesuaian pelaksanaan aturan tertulis dan aturan tidak tertulis terhadap manfaat (keuntungan) yang dirasakan oleh petani dalam kerjasama pengelolaan hutan rakyat lestari. Tingkat keadilan manfaat dikategorikan 3 kelas (rendah, sedang dan tinggi). Untuk mengukur tingkat keadilan terhadap aturan tertulis dan aturan tidak tertulis dilakukan dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Selang Nilai} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

Hasil pengukuran tingkat keadilan terhadap aturan tertulis dan aturan tidak tertulis menggunakan tiga kategori, yaitu:

- a. Tingkat manfaat aturan tertulis yang mengatur anggota kelompok dalam mengelola hutan rakyat.
  - Rendah : aturan tertulis tidak adil
  - Sedang : aturan tertulis kurang adil
  - Tinggi : aturan tertulis sudah adil
- b. Tingkat manfaat aturan tidak tertulis yang mengatur anggota kelompok dalam mengelola hutan rakyat.
  - Rendah : aturan tidak tertulis tidak adil
  - Sedang : aturan tidak tertulis kurang adil
  - Tinggi : aturan tidak tertulis adil

### 4. Efisiensi Hutan Rakyat

Efisiensi yaitu biaya terendah dalam proses pengelolaan usaha hutan rakyat dengan pendapatan tertinggi. Efisiensi diukur berdasarkan tingkat unit usaha hutan rakyat yang dihitung berdasarkan input-output produksi (keuntungan dari pendapatan usaha

hutan rakyat dikurangi modal). Dalam menentukan tingkat efisiensi menggunakan data hasil wawancara dengan responden. Tingkat efisiensi dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelas, untuk besarnya tingkat efisiensi (rendah, sedang dan tinggi). Untuk mengukur tingkat efisiensi dilakukan dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Selang Nilai} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

Pengukuran tingkat efisiensi menggunakan tiga kategori, yaitu:

- Efisiensi rendah : biaya produksi > 40% dari nilai produksi
- Efisiensi sedang : biaya produksi 20% - 40% dari nilai produksi
- Efisiensi tinggi : biaya produksi < 20% dari nilai produksi

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Performansi hutan rakyat digunakan untuk menjelaskan performansi hutan rakyat berdasarkan produktivitas, keberlanjutan, keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro.

### A. Produktivitas Hutan Rakyat

Hutan rakyat yang dibangun di Kelurahan Selopuro berada di tegalan dan pekarangan. Luas total dari masing-masing lahan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro, yaitu: pekarangan 96,22 Ha dan tegalan 166,55 ha.

Jumlah pohon yang dimiliki oleh petani hutan rakyat di Kelurahan Selopuro tergolong tinggi. Seluruh petani hutan rakyat di lokasi penelitian menyatakan bahwa jumlah pohon yang ada di lahan masing-masing petani berjumlah diatas 400 pohon/ha. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil pengukuran lapangan di Kelurahan Selopuro dicantumkan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Kerapatan pohon (pohon/ha) hutan rakyat di Kelurahan Selopuro

No.	Lokasi/Jenis Pohon	Jumlah Pohon/ha
a.	Pekarangan	
	Jati	940
	Mahoni	847
	Total Pekarangan	1.850
b.	Tegalan	
	Jati	1.256
	Mahoni	1.478
	Total Tegalan	2.784
	Total Jati	2.196
	Total Mahoni	2.325
	Total seluruhnya	4.521

Sumber : Hasil Penelitian diolah Pribadi

Berdasarkan Tabel 2, jumlah pohon di Kelurahan Selopuro yaitu masing-masing jenis sebesar 2.196 batang/ha jenis jati dan 2.325 batang/ha jenis mahoni. Bila dibandingkan dengan pernyataan Awang (2001) bahwa dalam pengelolaan hutan rakyat konvensional yang biasa digunakan sebagai standar hutan rakyat yang baik adalah 400 pohon/ha. Merujuk pada pernyataan tersebut maka potensi kerapatan pohon di Kelurahan Selopuro tergolong tinggi.

Tabel 3. Volume pohon (m<sup>3</sup>/ha) hutan rakyat di Kelurahan Selopuro

No.	Lokasi/Jenis Pohon	Volume Pohon (m <sup>3</sup> /ha)
a.	Pekarangan	
	Jati	111.55
	Mahoni	27.45
	Total Pekarangan	139,00
b.	Tegalan	
	Jati	82.19
	Mahoni	62.63
	Total Tegalan	144,82
	Total Jati	193.74
	Total Mahoni	90.08
	Total seluruhnya	283,82

Sumber : Hasil Penelitian diolah Pribadi

Berdasarkan Tabel 3, volume pohon di Kelurahan Selopuro masing-masing jenis

sebesar 193,74 (m<sup>3</sup>/ha) jenis jati dan 90,08 (m<sup>3</sup>/ha) jenis mahoni. Jumlah volume pohon 283,82 (m<sup>3</sup>/ha) di Kelurahan Selopuro tergolong tinggi.

## B. Keberlanjutan

Upaya yang dilakukan oleh komunitas petani hutan rakyat untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan hutan rakyat adalah penanaman kembali untuk mengganti pohon yang ditebang dengan menerapkan metode jumlah pohon atau manajemen pohon, yaitu usaha-usaha untuk pengelolaan pohon demi pohon dari berbagai struktur tanaman. Berdasarkan hasil wawancara bahwa seluruh (100%) petani hutan rakyat di lokasi penelitian melakukan penanaman/peremajaan dan pemeliharaan tanaman kembali. Dengan demikian tingkat usaha yang dilakukan petani untuk mempertahankan keberadaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro tergolong tinggi.

## C. Keadilan

Komunitas petani hutan rakyat di Kelurahan Selopuro terdapat aturan tertulis (Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri) dan aturan tidak tertulis (nilai, norma, kesepakatan dan tata kelakuan lainnya) yang menjadi pedoman bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat. Tingkat keadilan manfaat menurut jenis aturan dalam pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro dicantumkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat keadilan manfaat menurut jenis aturan dalam pengelolaan hutan rakyat

No	Jenis Aturan	Tingkat Keadilan Kelurahan Selopuro		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1	Aturan tertulis	20	27	53
2	Aturan tidak tertulis	-	-	100

Sumber : Hasil Penelitian diolah Pribadi

Berdasarkan Tabel 4, tingkat manfaat aturan tertulis yang mengatur anggota kelompok dalam mengelola hutan rakyat di Kelurahan Selopuro berbeda-beda. Sebagian

besar besar (53%) responden di Kelurahan Selopuro merasakan manfaat aturan tertulis tinggi, 27% sedang dan 20% rendah. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat aturan tertulis berupa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang dicantumkan dalam: (1) Peraturan Bupati Wonogiri No. 1 Tahun 2007 Tentang Retribusi Ijin Pengangkutan Kayu Rakyat di Kabupaten Wonogiri; (2) Surat Bupati Wonogiri Perihal Pengendalian Penebangan dan Peredaran Kayu Rakyat; (3) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri No.522.4/38.25 Perihal Pembentukan Tim Pelayanan Izin Menebang Pohon Milik Rakyat Tingkat Kecamatan, dirasakan oleh petani berbeda-beda yaitu ada yang merasa aturan tertulis sudah adil, kurang adil bahkan tidak adil.

Tingkat manfaat aturan tidak tertulis yang mengatur anggota kelompok dalam mengelola hutan rakyat di Kelurahan Selopuro sebagian besar besar (100%) responden merasakan manfaat aturan tidak tertulis tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat aturan tidak tertulis berupa nilai, norma, kesepakatan dan tata kelakuan lainnya yang menjadi pedoman bertindak petani dalam pengelolaan hutan rakyat yang mengatur anggota kelompok dalam mengelola hutan rakyat dirasakan petani aturan tidak tertulis sudah adil.

Berdasarkan Tabel 4, bila dilihat dari prosentase kedua aturan tersebut, aturan tidak tertulis lebih tinggi dibanding dengan aturan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa petani lebih merasa adil dengan manfaat aturan tidak tertulis, sehingga petani lebih mematuhi nilai, norma, kesepakatan dan kebiasaan yang ada dimasyarakat dibanding mematuhi peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terkait pemanfaatan/penebangan pohon. Alasan tidak patuh (mentaati) aturan tersebut, karena sebagian besar (100%) petani memanen/menjual pohon ketika dalam keadaan mendesak saja, jadi jika ada kebutuhan mendesak dan harus menunggu pohon sampai sesuai persyaratan aturan tersebut, siapa yang akan menanggung kebutuhan petani. Selama ini pemerintah

mengeluarkan aturan, namun tidak mengatasi kebutuhan petani. Lain halnya, kalau dengan mengeluarkan aturan tersebut pemerintah pun dapat mengatasi kebutuhan-kebutuhan petani tersebut, seperti adanya bantuan ternak, modal bergilir, insentif bagi yang mempertahankan hutannya dan bantuan lain sesuai kebutuhan petani, maka petani pun akan mematuhi aturan tertulis yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

#### D. Efisiensi

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani di Kelurahan Selopuro relatif kecil, berdasarkan hasil wawancara bahwa seluruh (100%) responden dalam pengelolaan hutan rakyat kurang dari 20% dari nilai produksi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dalam pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro tergolong tinggi.

Tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan hutan rakyat tersebut disebabkan oleh biaya *in-put* yang rendah dalam sistem pengelolaan (waktu, modal, tenaga kerja, keamanan). Selain itu, adanya komponen-komponen *property right* dalam pengelolaan hutan rakyat seperti hak kepemilikan, penguasaan dan pengelolaannya yang jelas. Faktor-faktor tersebut akan dapat menjelaskan perbandingan antara *out-put* dan *in-put*.

Hutan rakyat yang sudah terbangun sekarang dalam pengelolaannya tidak membutuhkan banyak waktu untuk pemeliharaan, karena benih/bibit pohon-pohon tumbuh sendiri secara alami dari proses penyerbukan dan kalau sudah tumbuh petani jarang melakukan pemeliharaan (pemupukan, pendangiran, penyiangan dan penjarangan) sehingga korbanan waktu dan biaya yang diperlukan juga lebih efisien dan murah.

Keamanan dalam pengelolaan hutan rakyat sangat tidak berpengaruh terhadap biaya produksi sehingga pengelolaan hutan rakyat relatif efisien. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tingkat solidaritas yang tinggi terkait tingkat keeratan hubungan dan intensitas saling terlibat dalam membantu kegiatan pengelolaan hutan dalam hal kesediaan saling memberi benih/bibit dan

saling mengawasi dalam mengamankan kelestarian hutan rakyat.

Efisiensi pada hutan rakyat dapat terlihat dari jelasnya hak-hak kepemilikan, penguasaan, pengelolaan atau terdefinisinya dengan baik komponen-komponen *property right*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tietenberg (1992) dalam Suharjito (2000) bahwa pengelolaan suatu sumberdaya berada pada tingkat yang paling efisien dan karenanya *sustainable*, apabila struktur *property right*-nya terdefinisi dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa performansi disusun oleh produktivitas, keberlanjutan, keadilan dan efisiensi. Tingkat performansi pada komunitas petani hutan rakyat di Kelurahan Selopuro tergolong tinggi dengan skor sebesar 400. Rekapitulasi tingkat performansi hutan rakyat dicantumkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Tingkat Performansi Hutan Rakyat

No.	Performansi Hutan Rakyat	Skor Tingkat Performansi Hutan Rakyat Kelurahan Selopuro
1	Produktivitas	90
2	Keberlanjutan	90
3	Keadilan	160
4	Efisiensi	90
Jumlah		400

Sumber : Hasil Penelitian diolah Pribadi

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Performansi hutan rakyat di Kelurahan Selopuro yang diukur dengan unsur-unsur produktivitas, keberlanjutan, keadilan dan efisiensi tergolong tinggi. Terbangunnya performansi hutan rakyat yang tinggi, dicirikan oleh tingkat produktivitas hutan rakyat yang tinggi, berlangsungnya pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan, manfaat aturan dalam pengelolaan yang adil dan biaya pengelolaan hutan rakyat yang efisien. Performansi yang tinggi akan mendorong pengelolaan hutan rakyat yang lebih baik.

### B. Saran

Perlu adanya peningkatan peran dan posisi para pihak terutama pihak pemerintah dalam memfasilitasi perluasan jaringan untuk memperoleh informasi dan penguatan aturan yang berlaku pada masyarakat, sehingga diharapkan pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selopuro terjaga performasinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Komunitas Petani Hutan Rakyat (KPS) Kelurahan Selopro Kabupaten Wonogiri yang telah membantu selama penelitian hingga terpublikasinya artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S.A. 2007a. Manajemen Hutan Rakyat Kolaboratif di tingkat Kawasan. Paper Lokakarya Hutan Rakyat Relung-PKHR. Available at : <http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/>
- Awang, S.A. 2007b. Kontruksi Pengetahuan dan Manajemen Hutan Rakyat. Makalah Lokakarya Hutan Rakyat, Ciamis 30 Oktober 2007. Available at: <http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/>
- Bismark, M., R. Sawitri dan N.M. Hariyanto. 2007. Zonasi dan Karakteristik Hutan Rakyat di Daerah Penyangga Taman Nasional Gunung Halimun. Infi Hutan. Vol. IV. No. 2: 187-199. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi. Bogor.
- BPKH XI dan MFP-II. 2009. Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa Tahun 1990-2008. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura bekerjasama dengan Multistakeholders Forestry Programme (MFP).
- Darusman, D. dan Hardjanto. 2006. *Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor 21 September 2006.
- Diniyati, D. dan S.A. Awang. 2010. Kebijakan Penentuan Bentuk Insentif Pengembangan Hutan Rakyat di Wilayah Gunung Sawal, Ciamis dengan Metoda AHP. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2:129-143. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.



- Hakim, I. 2010. Analisis Kelembagaan Hutan Rakyat pada Tingkat Mikro di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 7 No. 1 : 23-40: 43-56. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Irawan P. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok: Universitas Indonesia
- Jariyah, N.A. dan N. Wahyuningrum. 2008. Karakteristik Hutan Rakyat di Jawa. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 5 No. 1: 43-56. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Muslich, M. dan Krisdianto. 2006. Upaya Peningkatan Kayu Rakyat Sebagai Bahan Baku Industri. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006*: 110-129. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Bogor 21 September 2006.
- Nugroho, B. 2010. Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat, *JMHT* Vol. XVI, (3): 118-125.
- Priyadi, N., D. Darusman, B. Nugroho, dan N. Wijayanto. 2010. Kelembagaan Kemitraan Industri Pengelolaan Kayu Bersama Rakyat untuk Membangun Hutan di Pulau Jawa. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 7 No. 2 : 127-138. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Suharjito, D. 2000. Hutan Rakyat di Jawa: Perannya dalam Perekonomian Desa. *Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat*, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Suharjito D, Khan A, Djatmiko WA, Sirait MT, dan Evelyn S. 2000. *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. Kerjasama FKKM-Ford Foundation. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sahadat, E dan Sabarudi. 2007. Kajian Dampak Pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 Terhadap Efektifitas Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 4 No. 2 :177-191 Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Usman H dan Akbar PS. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, B dan E.A. Waluyo. 2007. Potensi Pengembangan Hutan Rakyat Dengan Jenis Tanaman Kayu Lokal. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian Hutan Tanaman Balai Penelitian Kehutanan Palembang 2007*: 28-34.
- Widiarti, A dan S. Prajadinata. 2008. Karakteristik Hutan Rakyat Pola Kebun Campuran. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* Vol. 5, No. 2:145-156. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Bogor.